e-ISSN 2985-4601
Jurnal Pelita Pengabdian
Volume 3 Nomor 1 Januari 2025

Aksi Peduli PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang Melalui Sumbangan Air Bersih Akibat Kekeringan

Purwanto[1], B.M.A.S. Anaconda Bangkara[2], Muhamad Fatchan[3]
[1]Fakultas Bisnis, Universitas Presiden, Bekasi, Indonesia
[2]Fakultas Teknik, Universitas Presiden, Bekasi, Indonesia
[3]Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Email: purwanto@president.ac.id

Diterima: 08-02-2025 *Direvisi: 13-02-2025* *Dipublikasikan: 15-02-2025*

Abstrak

Studi ini mempunyai tujuan untuk menginvestigasi langka-langkah strategis PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kapabilitas bisnis dan menjalankan peran sosial. Implementasi metode kualitatif yang meliputi studi literatur, dokumen dan obsrvasi lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi di jurnal, laporan Badan Pusat Statistik, surat kabar, *website*. Observasi lapangan dilakukan dengan meninjau langsung keadaan di lapangan sesuai fakta dan bukti yang ada. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa aksi peduli dengan memberikan bantuan air bersih di beberapa daerah Pemalang yang dilanda kekeringan telah mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Tindakan nyata ini telah menambah persepsi positif bagi lembaga yang berfungsi komersial maupun sosial. Kolaborasi yang efektif dengan pemerintah daerah, MAN Pemalang, Polres Pemalang, Paguyuban Alumni Smanco 91 dan Rekan (P91&R) bersama Pagarsih, Relawan Mas Tyo, Kagama Pemalang, serta donatur-donatur lainnya telah mampu meringankan beban bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Akselerasi penyediaan air bersih sepanjang masa menjadi prioritas pemerintah dan swasta. Aksi nyata yang telah dipraktekkan berdampak dan dirasakan langsung masyarakat sehingga perekonomian menjadi lebih baik.

Kata kunci: Aksi peduli, air bersih, kekeringan, komersial, sosial

Abstract

This study aims to investigate the strategic steps of PT. LKM BKD Pemalang Regency in improving business capabilities and carrying out social roles. Implementation of qualitative methods including literature studies, documents and field observations. Literature studies were conducted by searching for information in journals, reports from the Central Statistics Agency, newspapers, websites. Field observations were conducted by directly reviewing the conditions in the field according to the facts and evidence available. The results of the study show that caring actions by providing clean water assistance in several areas of Pemalang that were hit by drought have received an enthusiastic response from the community. This real action has increased the positive perception of institutions that function commercially and socially. Effective collaboration with the local government, MAN Pemalang, Polres Pemalang, Paguyuban Alumni Smanco 91 and Partners (P91&R) together with Pagarsih, Relawan Mas Tyo, Kagama Pemalang, and other donors have been able to ease the burden for people who have been hit by disasters. Acceleration of the provision of clean water throughout time is a priority for the government and the private sector. Real actions that have been put into practice have an impact and are felt directly by the community so that the economy becomes better.

Keywords: *Caring action, clean water, drought, commercial, social*

PENDAHULUAN

Keuangan inklusif (*financial inclusion/FI*) sudah dan akan dikembangkan di 108 negara di mana peranan *microfinance* sangat nyata di beberapa negara seperti India, Bangladesh, Meksiko, Afrika

Selatan, Kenya, Trinidad dan Tobago (Chibba, 2009). FI diberikan bagi seluruh lapisan masyarakat agar memiliki akses terhadap sistem keuangan khususnya kelompok miskin yang tidak terbatas terhadap perbankan, tetapi lembaga keuangan lainnya. Akses keuangan memberikan fasilitas dalam kehidupan sehari-hari dan bisnisnya untuk jangka waktu lama sampai kebutuhan darurat yang tidak terduga (Ika, 2022). Tahun 2023, masyarakat Indonesia telah tercatat dalam kepemilikan rekening atau akun sebanyak 76,23% dengan tingkat inklusi keuangan tercatat 88,7% lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1% menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) (Antara, 2024). Di sisi lain tingkat kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan pada tahun 2022 sebesar 35,4% menjadikan tantangan tersendiri. Sumbangan terbesar disparitas berada pada kelompok masyarakat yang termasuk dalam golongan sosial ekonomi sekitar 29,3% di tahun 2022.

Darmin Nasution (Nasution, 2013) sebagai gubernur bank Indonesia menekankan bahwa inklusi keuangan menjadi program utama untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dimulai sejak 2010. Hadad, M (2013) sebagai deputy gubernur BI mengatakan bahwa pemerintah siap melaksanakannya untuk menjangkau kelompok yang *unbanked people.* Rosmaya menandaskan agar pelayanan keuangan dapat dinikmati semua lapisan termasuk kaum miskin (Rosmaya, 2013). Mubyarto mengatakan bahwa ada hambatan akses keuangan bagi kelompok miskin untuk mengembangkan usaha khususnya pengusaha kecil menengah dan masalah ini ditengarai menjadi sebab sulitnya mengembangkan usaha (Mubyarto, 1995 dalam Purwakanta, 2010). Menurut Scombe (2010), orang miskin dan masyarakat kecil tidak dapat dibiarkan bersaing tanpa bantun karena mereka tidak layak masuk dalam sistem keuangan formal akibat faktor resiko, jaminan dan biaya operasi yang tinggi. Kelompok miskin adalah korban dari sebuah sistem, artinya terpaksa terpinggirkan dikarenakan kondisi dan prasyarat serta target marketing dan sistem keuangan formal (Carbo, Gardener and Molyneux, 2007).

Sebenarnya di Indonesia program keuangan inklusif sudah lama dilakukan oleh lembaga keuangan mikro, seperti: koperasi kredit, koperasi syariah dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dengan berbagai cara dan upaya. Purwakanta (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan yang efektif dimulai dengan memberdayakan kemampuan kapasitas manusia bukan langsung membuka akses layanan finansial kepada kelompok miskin. Disarankan lembaga adat gotong royong, koperasi, musyawarah dan lembaga adat dapat terlibat aktif bekerja sama dengan pemerintah agar program berjalan baik. Meera (2013) menyatakan bahwa lembaga keuangan berbentuk koperasi seperti BMT adalah cara terbaik untuk memberdayakan masyarakat miskin dari aspek finansial, karena lembaga ini berdasarkan nilai kerja sama dari anggota untuk anggota. Pendekatan keuangan formal tidak sesuai dengan budaya mereka di samping secara finansial mempunyai kelemahan yang tidak cocok dengan prinsip-prinsip formal seperti prosedur, mekanisme dan pembayaran. Sebagai contoh tidak sinkronnya periodisasi *cash flow* antara bank dengan petani ataupun nelayan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki karakteristik khusus yakni memberikan kredit kepada usaha mikro/kecil dan masyarakat miskin. Oleh karena itu, banyak praktisi sepakat dalam menilai kinerja suatu lembaga keuangan mikro kita harus memperhatikan ukuran jangkauannya (*outreach).* Lembaga Keuangan Mikro harus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meminimalkan biaya operasional. Efisiensi keuangan maupun sosial menjadi keharusan untuk memobilisasi dana dari masyarakat atau dari sumber komersial lainnya, mengarahkan LKM beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip pasar atau dikenal dengan komersialisasi LKM (Charitonenko et al., 2004). Sampai saat ini, topik tentang *trade-off* antara keberlanjutan dan efisiensi dengan *outreach* (jangkauan bagi masyarakat miskin), masih menjadi perdebatan, terutama antara

e-ISSN 2985-4601
Jurnal Pelita Pengabdian
Volume 3 Nomor 1 Januari 2025

kalangan *welfarists* yang cenderung mempropagandakan dominasi tujuan *outreach*, dengan *institutionalist*, yang lebih menekankan pentingnya keberlanjutan dan efisiensi (Hermes et al, 2011).

Merujuk pada peraturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maka PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang sebagai salah satu Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang yang merupakan hasil transformasi terhadap 9 (sembilan) BKD yang meliputi wilayah Kelurahan Mulyoharjo, Pelutan, Kebondalem, Sugihwaras, Bojongbata, Wanarejan Selatan, Beji, Petarukan dan Purwoharjo memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan ekonomi masyarakat bawah serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (PT. LKD BKD Kab. Pemalang, 2024). Tahun 2022 lembaga keuangan ini telah berhasil melampaui target tahunan yang ditetapkan dengan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari usahanya. Angka Non Performing Loan (NPL) di awal perusahaan ini berdiri menembus angka 19,25% dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 10,05%. Diproyeksikan akan turun menjadi 9,5% meskipun angka ini masih di atas standar NPL, yaitu di bawah 5% agar kredit macet sedikit. Perolehan laba yang ditarget senilai 10% selalui terpenuhi dan aset perusahaan juga naik sebesar 9,59% meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 (Suara Merdeka, 2024).

Disamping meraih profitabilitas untuk pertumbuhan perusahaan, PT. LKM BKD juga melakukan kegiatan sosial ke masyarakat yang berupa sumbangan air bersih di beberapa wilayah kekeringan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dua tugas yang diemban untuk komersialisasi dan sosial dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan secara simultan berupa sumbangan air bersih akibat kekeringan. Gambar 1.1 memperlihatkan seluruh karyawan yang bekerja secara tim.

Gambar 1. Pimpinan dan Staf PT. LKM BKD Kabupeten Pemalang
Sumber: https://lkmbkd.pemalangkab.go.id/home, 2024

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu bentuk lembaga intermediasi keuangan yang memiliki karakteristik yang berbeda dibanding lembaga keuangan/perbankan formal lainnya, terutama pada kelompok sasaran (*target group*) yang dilayani. Keberadaan LKM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan umum yaitu masyarakat golongan miskin dan sangat miskin. Keuangan mikro menawarkan akses perorangan bagi

golongan berpenghasilan rendah terhadap jasa keuangan yang mendasar, yaitu pinjaman, rekening tabungan, jasa pemindahan uang dan asuransi serta memberikan bantuan individu-individu dari tingkat kemiskinan (Ledgerwood, 2000; Robinson, 2001).

The Consultant Group to Assist the Poorest (CGAP, 2003) memberikan arti tentang keuangan mikro yang seharusnya sebagai pelayanan bank kepada masyarakat miskin dan sangat miskin yang mempunyai penghasilan rendah. *ProFi* (2005) menjelaskan arti usaha mikro yang berfungsi sebagai penyangga ekonomi negara Indonesia melalui peningkatan kemakmuran rakyatnya dan menawarkan kesempatan kerja. Fungsi ini dapat dilaksanakan usaha mikro melalui beberapa syarat seperti terwujudnya dan akses pendanaan dalam memulai usaha atau menambah aktivitas dalam berkarya. Disayangkan fungsi itu belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik oleh rumah tangga (RT) yang memperoleh hasil minim dan pengusaha mikro karena baru sedikit dari mereka yang dapat dilayani oleh keuangan mikro dan sulitnya akses terhadap layanan keuangan formal. Buktinya beberapa LKM di negara kita mempunyai beraneka ragam variasi dan jumlah yang banyak.

Menurut kejadian yang ada di organisasi perantara keuangan, menyediakan pelayanan orang-orang di bawah garis kemiskinan memerlukan biaya transaksi tinggi karena *size* yang sangat kecil dalam setiap pembayaran keuangan. Sebagai contoh, ongkos yang ditawarkan untuk menabung ke nasabah begitu tinggi akibat rutinitas menabung yang rendah. Di sisi lain dengan model pinjaman, memerlukan bantuan administrasi seperti metoda tabungan besar di organisasi keuangan formal tetapi memberikan dampak penghasilan yang kecil, bahkan dapat merugi. Pada dasarnya mengukur jangkauan layanan keuangan bagi orang-orang miskin dari lembaga keuangan mikro memerlukan rata-rata jumlah pinjaman (Cull et al, 2007; Mersland & Strom, 2010; Hermes et al, 2011).

Kemiskinan dapat diartikan sebagai watak multidimensional, yang artinya sulit dikalkulasi dari satu sisi saja seperti halnya nilai pinjaman rata-rata, tetapi meliputi beberapa faktor status sosial dan ekonomi rumah tangga. Agar dapat mencapai faktor itu diperlukan unsur kualitatif dan kuantitatif. Untuk keperluan tersebut maka perlu dilakukan perbandingan beberapa indikator terpilih antara rumah tangga yang sudah akses dan belum akses kepada LKM (Hulme, 2000).

Kedalaman jangkauan menyangkut tingkat kemiskinan klien lembaga keuangan mikro. Keterjangkauan diukur melalui dua dimensi berupa dimensi kedalaman, yaitu seberapa miskin anggota dan dimensi keluasan menyangkut berapa banyak masyarakat yang bisa diraih LKM (Olivares-Polanco, 2005). Jangkauan diukur menurut jumlah klien yang dilayani dan volume pelayanan seperti total tabungan dalam deposito serta total portofolio yang belum diselesaikan. Gutiérrez-Goiria *et al*. (2007) dalam temuannya memperlihatkan ada hubungan positif signifikan antara efisiensi dukungan wanita dan efisiensi dalam kesejahteraan. Sebaliknya tingginya persentase peminjam wanita tidak berkorelasi positif terhadap tingginya level inefisiensi (Heidmann dan Nilsholm, 2012). Jangka waktu penjangkauan adalah kerangka waktu dimana Lembaga Keuangan Mikro menghasilkan pinjaman atau produk serta layanan (Schreiner, 2002). Lingkup penjangkauan adalah jumlah berbagai jenis pinjaman, tabungan, asuransi dan produk lainnya ditawarkan dipecah berdasarkan lini produk atau jenis produk (Rama, 2014). Tabungan dan biaya tiap peminjam mendukung lingkup dan skala ekonomi (Oteng-Abayie, 2011). Biaya tiap peminjam mengindikasikan Lembaga Keuangan Mikro senantiasa melakukan perbaikan efisiensi. Hossain dan Khan (2016) mempertegas bahwa deposito tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan. Gutierrez-Goiria *et al*. (2016) menjelaskan bahwa kinerja lembaga keuangan mikro diukur dari segi keuangan dan sosial.

Peran ganda lembaga keuangan mikro sebagai fungsi komersial dan sosial yang berjalan secara simultan. Secara komersial, lembaga ini harus mendapatkan profit yang baik agar dapat

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan peranan sebagai lembaga sosial, oganisasi ini harus mampu menjalankan keberadaanya dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial termasuk penanggulangan bencana, donasi, penyediaan air bersih, santunan anak yatim, penyediaan ambulan, dan lain-lain. Dalam hal ini, kegiatan pemberian bantuan air bersih di saat warga Pemalang mengalami kekeringan sebagai bentuk tindakan sosial. Masyarakat sangat terbantu dengan langkah ini dan nama baik serta *image* LKM BKD semakin meningkat. Bertambahnya citra positif akan mempermudah lembaga ini untuk mengajak calon nasabah yang potensial untuk menjadi pelanggan baru dan mempertahankan nasabah lama sehingga pertumbuhan ekonomi terus terjaga.

METODE

Metode kualitatif sebagai pilihan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Proses kegiatan dalam pengolahan dan analisa data dikerjakan secara terus-menerus sampai ditemukan kejenuhan atau tidak ada lagi perbedaan pendapat yang signifikan hasil wawancara (Miles & Huberman, 1984; Rohidi, 2011). Metode pengumpulan data lebih difokuskan pada pencarian sumber-sumber informasi yang sudah dipublikasikan di beberapa media, surat kabar, website, dan beberapa pemberitaan lainnya. Tahap awal adalah pengumpulan informasi mengenai kawasan melalui studi literatur, dokumentasi dan observasi lapangan terkait penyaluran air bersih. Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi dari jurnal, laporan Badan Pusat Statistik, surat kabar, website terkait PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang. Dokumentasi adalah memperoleh data tertulis seperti dokumen kegiatan, keadaan, sarana dan prasarana, alur kerja perusahaan dalam kaitannya dengan kegiatan ke masyarakat sekitar. Studi pengamatan melalui eksplorasi informasi yang lebih akurat dan mencermati perilaku orang-oreang yang berinteraksi dengan lembaga tersebut. Observasi di lapangan dilakukan dengan memastikan kegiatan dan dampak pemberian air bersih kepada warga Pemalang. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data sesuai analisis yang telah ditentukan. Penyajian hasil dalam bentuk tabel atau grafik kemudian diinterpretasikan dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Visi dan Misi PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang

Dalam menjalankan bisnisnya, lembaga selalu mengacu terhadap visi dan misi yang telah dicanangkan, yaitu:

“Visi Perusahaan: Menciptakan PT. LKM BKD yang Sehat, Efisien dan Mampu Bersaing dengan Lembaga Keuangan Lainnya.

“Misi Perusahaan: Mendorong pelaku untuk tetap bekerja, selalu mengutamakan Pelayanan Prima, Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar dapat bekerja dengan Profesional.

Adapun tujuan utamanya adalah:

a. Memberikan perlindungan aset dana bergulir masyarakat serta penyalahgunaan
b. Memastikan mengikuti aturan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM
c. Menyediakan pelayanan keuangan mikro secara legal, profesional, akuntabel dan berkelanjutan.
d. Meningkatkan peluang simpan pinjam secara luas
e. Adanya pembinaan dan pengawasan dari regulator yang kompeten.

Upaya mencapai visi dan misi yang sudah dicanangkan, PT. LKM BKD mulai bertransformasi ke arah komputerisasi dan digitalisasi. Keinginan terus berinovasi di bidang sarana dan prasarana terus dilakukan oleh Direksi. Langkah ini diambil dalam rangkan memenuhi tuntutan jaman dan meningkatkan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat. Seluruh unit kerja telah didukung dengan sistem aplikasi yang dipasang di tahun 2024 di semua komputer secara

e-ISSN 2985-4601
Jurnal Pelita Pengabdian
Volume 3 Nomor 1 Januari 2025

serentak. Target utamanya agar kecepatan pelayanan dan kebutuhan masyarakat lebih mudah terpenuhi seperti ditunjukkan pada Gambar 2, tentang pendampingan uji coba aplikasi akuntansi.

Gambar 2. Pendampingan Uji Coba Aplikasi Akuntansi
Sumber: PT. LKM BKD Kab. Pemalang, 2024

2. Pesan Bupati Pemalang

Saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Bupati Pemalang, Mansur Hidayat yang waktu itu masih berstatus Plt memberikan arahan kepada PT. LKM BKD dengan memberikan tugas khusus ke Bagian Perekonomian dan SDA Setda Pemalang agar masyarakat khususnya menengah ke bawah dapat mengakses dan mendapatkan permodalan dengan mudah seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Bupati Pemalang Saat Menghadiri RUPS

e-ISSN 2985-4601
Jurnal Pelita Pengabdian
Volume 3 Nomor 1 Januari 2025

Selama ini korban rentenir banyak terjadi di golongan orang-orang miskin. Apalagi tugas utama lembaga keuangan mikro yang harus melindungi masyarakat yang rentan dibujuk dan dirayu para rentenir atau bank titil (Pemalang, mediakita.co., 2022). Suku bunga yang dikenakan bank titil biasanya lebih tinggi dari perbankan pada umumnya sehingga sangat membebani nasabah. Jumlah kemiskinan di Kabupaten Pemalang sekitar 15,03% menurut data per November 2023, angka ini sedikit lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 15,06%. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah, total penduduk pada tahun 2023 di wilayah kabupaten ini sebanyak 1,57 jiwa. Angka ini akan menjadi sasaran utama bagi rentenir untuk menjalankan bisnisnya, PT. LKM BKD berusaha mengantisipasi agar tidak terjadi.

3. Membantu Masyarakat Kekurangan Air Bersih

Gambar 4. PT. LKM BKD Pemalang Peduli
Sumber: Mediakita.co, 2023

Aksi nyata yang diberikan PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang berupa pengiriman bantuan air bersih telah disambut antusias masyarakat di Kecamatan Pulosari. Daerah ini selalu mengalami kekeringan di musim kemarau karena jumlah mata air yang terbatas. Belum lagi imbas el nino di sejumah wilayah di Kabupaten Pemalang, salah satunya di wilayah Pulosari yang paceklik air bersih. Fenomena ini menggugah Direktur Utama PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang untuk turut serta dalam aksi sosial dengan mengirimkan air bersih sebanyak 20.000 liter. Melalui koordinasi dengan Camat Pulosari dan jajarannya, air bersih diberikan di 2 (dua) desa, yaitu Batursari dan Siremeng. Masyarakat merasa bersyukur dengan kepedulian lembaga ini karena air bersih yang dibagikan dapat digunakan untuk memasak, air minum, mandi dan aktivitas lainnya. Biasanya saat musim hujan tiba, masyarakat memanfaatkannya dengan menempatkan bak-bak penampungan secara mandiri akibat kesulitan mendapatkan air dan kendala pembuatan sumur. Meskipun pengiriman air bersih bersifat sementara tetapi sambutan masyarakat sangat positif. Perlu diketahui bahwa kemarau panjang dan kesulitan air rutin terjadi setiap tahun bahkan sudah melanda beberapa tahun sebelumnya. Harapan pemerintah daerah agar peristiwa ini segera diatasi dengan kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta.

e-ISSN 2985-4601
Jurnal Pelita Pengabdian
Volume 3 Nomor 1 Januari 2025

Gambar 5. Antrian Warga Akibat Krisis Air Bersih

Seperti diketahui bahwa di bulan September 2023 terjadi hujan seharian dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan pengumuman peringatan dini kondisi cuaca di Jawa Tengah terutama menyangkut kekeringan meteorologis. Kekeringan ini terjadi alami akibat tingkat curah hujan di bawah normal. Bencana melanda di beberapa wilayah Pemalang, seperti wilayah kecamatan Belik dan Pulosari. Salah satu perangkat Desa Simereng, Pulosari yang bernama Sutarno mengungkapkan bahwa desanya dilanda kondisi kekurangan air bersih, khususnya di Dusun Krajan yang paling parah. Kondisi normal, warga masyarakat mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bagi kebutuhan sehari-hari, sedangkan saat musim kemarau panjang sulit didapatkan air bersih bagi warga. Menurut penuturannya,"warga masyarakat di sini apabila mau mencuci pakaian harus ke mata air Moga. Setelah subuh, pagi-pagi secara rombongan warga menuju ke sana dengan menggunakan mobil Coak atau *pick up*. Sebagian warga membeli air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak."Melihat kejadian seperti ini pihak pemerintah Kabupaten Pemalang yang diinisiasi oleh Bupati Mansur Hidayat berusaha menggerakkan semua komponen yang ada. Beberapa swadaya masyarakat dan bantuan air bersih dari kolaborasi PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang, MAN Pemalang, Polres Pemalang, Paguyuban Alumni Smanco 91 dan Rekan (P91&R) bersama Pagarsih, Relawan Mas Tyo, Kagama Pemalang, serta donatur-donatur lainnya.

e-ISSN 2985-4601
Jurnal Pelita Pengabdian
Volume 3 Nomor 1 Januari 2025

Gambar 6. Kolaborasi Donatur Memberikan Bantuan Air Bersih

Semangat swadaya masyarakat telah menggugah pihak pemerintah daerah untuk mempercepat atau akselerasi penyediaan air bersih sepanjang masa melalui kerja sama dengan swasta.

SIMPULAN DAN SARAN

Selama menjalankan bisnisnya, PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang selalu merujuk pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi yang mengedepankan organisasi yang sehat, efisien serta mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan misi perusahaan dengan mendorong karyawan agar tetap bekerja dengan mengutamakan pelayanan prima, bekerja secara profesional bagi seluruh sumber daya yang ada. Organisasi telah mampu meningkatkan profitabilitas dengan memperluas jumlah nasabah serta melaksanakan fungsi sosial. Bupati Pemalang memberikan tugas khusus agar orang-orang yang berada di level menengah ke bawah dapat memperoleh akses dan modal secara mudah. Golongan ini yang rentan menjadi korban pelaku rentenir yang selalu membidik golongan orang-orang miskin. Ditambah lagi tugas utama lembaga keuangan mikro adalah melindungi masyarakat yang mudah dibujuk dan dirayu bank titil. Kegiatan sosial dilakukan dengan implemensai aksi peduli, salah satunya melalui pemberian sumbangan air bersih di beberapa wilayah kekeringan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Donasi air bersih merupakan aksi nyata yang dilakukan dalam peranannya sebagai fungsi sosial selain fungsi komersial. Air bersih yang dikirimkan masih bersifat sementara tetapi masyarakat menyambut dengan antusias. Kemarau panjang dan kesulitan air rutin sebenarnya melanda setiap tahun dari masa ke masa. Kolaborasi PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang, MAN Pemalang, Polres Pemalang, Paguyuban Alumni Smanco 91 dan Rekan (P91&R) bersama Pagarsih, Relawan Mas Tyo, Kagama Pemalang, serta donatur-donatur lainnya telah mampu membangkitkan gairah dan harapan pemerintah daerah agar segera dapat diatasi secara cepat. Melalui donasi air bersih, masyarakat merasa sangat terbantu dan berdampak pada nama baik lembaga menjadi bertambah. Akibatnya, pelanggan yang selama ini menggunakan produknya menjadi semakin loyal serta dapat menarik calon pelanggan baru untuk menggunakan lembaga keuangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Charitonenko, S., Campion, A., Fernando N.A. (2004), *Commercialization of Microfinance: Perspectives from South and Southeast Asia. Asian Development Bank.*
[2] Chibba, M (2009), *Financial Inclusion, Poverty Reduction and the Millennium Development Goals, The European Journal of Development Research, Volume 21, Issue 2, pp 213–230*
[3] Gutiérrez-Goiria et al. (2007), *Social Efficiency in Microfinance Institutions. Journal of the Operational Research Society Volume 60, 2009 - Issue 1*
[4] Gutiérrez-Goiria (2011), *Profitability and Social Performance of Microfinance Institutions: Empirical Evidence of Relations between Different Types of Variables" Revista Deconomia Mundal 27, 2011, 189-214*
[5] Gutierrez-Goiria, J., San-Jose, L., and Retolaza, J. L. (2016), *Social Efficiency in Microfinance Institutions: Identifying How to Improve It. Journal of International Development, DOI: 10.1002/jid.3239*
[6] Gujarati, D.N. (2012), *Basic Econometrics. Tata McGraw-Hill Education, Noida.*
[7] Hermes, N., Lensink, R., & Meesters, A. (2011), *Outreach and Efficiency of Microfinance Institutions. World Development 39.*
[8] Hossain dan Khan (2016), *Financial Sustainability of Microfinance Institutions (MFIs) of Bangladesh, European Journal of Business and Management, Vol 6, No 6*
[9] Kar and Deb (2017), *Efficiency Determinants of Microfinance Institutions in India: Two-Stage DEA Analysis, The Central European Review of Economics and Management, Vol 1, No 4 (2017)*
[10] Kementerian Keuangan (2021), Percepatan Inklusi Keuangan Digital, Indonesia Manfaatkan Momentum Presidensi G20, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/percepat-inklusi-keuangan-digital-indonesia-manfaatkan-momentum-presidensi-g20/
[11] Kipesha, Erasmus (2012), *Efficiency of Microfinance Institutions in East Africa: A Data Envelopment Analysis, European Journal of Business and Management ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol 4, No.17, 2012*
[12] KNEKS (2021), Strategi dan Teknis Pendirian BMT Pesantren, https://kneks.go.id/berita/408/strategi-dan-teknis-pendirian-bmt-pesantren?category=1
[13] Kominfo (2019), Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial, Puslitbang Aptika dan IKP 2019
[14] Marr, Ana, and Awaworyi, Sefa (2012), *Microfinance Social Performance: A Global Empirical Study, Applied Econometrics and International Development, 12 (2). pp. 51-68. ISSN 1578-4487*
[15] Maududi (1985), *New Islamic Method for Education and Teaching, Beirut: al-Maktab al-Islami*
[16] Masudi (1993), *The Development of Secondary Education in Tanzania since Independence: The Partnership between the Government and the Voluntary Agencies, https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.402850*
[17] Mediakita.co,https://mediakita.co/aksi-sosial-pt-lkm-bkd-kirim-bantuan-air-bersih-ke-kecamatan-pulosari/
[18] Mubyarto (1995), Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta :LP3ES.
[19] Nghiem (2006), *The Efficiency of Microfinance in Vietnam: Evidence from NGO Schemes in the North and the Central Regions, International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, Vol.2*
[20] Nilsholm and Heidmann (2012), *Compatibility between Outreach and Efficiency in the Microfinance Market, School of Economics and Management, Lund University*

[21] Oteng-Abayie (2011), *The Measurement and Determinants of Economic Efficiency of Microfinance Institutions in Ghana: A Stochastic Frontier Approach. African Review of Economics and Finance, African Review of Economics and Finance*
[22] Pava, M. L. and Krausz, J. (1996), *The Association between Corporate Social- Responsibility and Financial Performance: The Paradox of Social Cost'. Journal of Business Ethics, 15, 321-57*
[23] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
[24] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
[25] Profil PT. Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang, 2024
[26] Rama Mohana, Ludego, Tamrat. (2015), *Concepts and Measures of Outreach and Sustainability in Microfinance Institutions: A Comprehensive Literature Review, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No.21*
[27] Rohidi, T. R. (2011), Metodologi Penelitian Seni. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
Schreiner, M. (1999), *Aspects of Outreach: A Framework for Discussion of the Social Benefits of Microfinance, Journal of International Development, Vol. 14 (5), pp. 591-603.*
[28] Solopos.com (2024), Mengintip Sekilas Kondisi Keuangan Penduduk Indonesia, https://espospedia.solopos.com/mengintip-sekilas-kondisi-keuangan-penduduk-indonesia-1890502
[29] Suara Merdeka (2024), PT LKM BKD Pemalang Lampaui Target Untung 10%, https://pantura.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-066357919/pt-lkm-bkd-pemalang-lampaui-target-untung-10
[30] Syahrir Ika (2022), Mendorong Inklusi Keuangan UMKM, Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/1674223131_wf3-rev.pdf